

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peternakan merupakan salah satu bagian dari sektor pertanian dalam pembangunan nasional Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan peternak. Hal ini dibuktikan dengan laju pertumbuhan yang selalu bernilai positif dan kontribusi yang cenderung meningkat, salah satunya pada Dinas Peternakan Kabupaten Agam. Dinas Kabupaten Agama memberikan bantuan terhadap sekelompok petani. Dinas Peternakan Kabupaten Agam dalam memberikan bantuan sering sekali bantuan ternak tidak sesuai sasaran dan bantuan ternak yang diberi tidak terurus dengan baik dikarenakan sering sekali kelompok tani atau ternak sesudah mendapat bantuan setelah dicek kembali ternak yang diberi tidak terurus dengan baik.

Dinas Peternakan Kabupaten Agam memberikan bantuan ternak untuk dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam dengan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta dapat memberikan kontribusinya nyata bagi pertumbuhan ekonomi kabupaten Agam. Oleh karena itu dinas peternakan kabupaten agam mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah dibidang peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinas peternakan mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang peternakan.

Dalam melakukan pemberian bantuan ternak masih dilakukan dengan menggunakan proses manual, yaitu Dinas Peternakan Kabupaten Agam dalam memberikan bantuan tidak menggunakan cara perhitungan khusus seperti menggunakan metode ilmiah dalam menentukan kelayakan bantuan ternak. Mengingat zaman yang terus berubah dan berkembang yang tidak bisa dibantah oleh manusia pembaharuan dalam segala hal kearah yang lebih ilmiah pasti akan terjadi begitu juga dalam memberi bantuan ternak kepada kelompok tani atau ternak dapat juga menggunakan pendekatan ilmiah.

Proses yang berjalan pada Dinas Peternakan Kabupaten Agam dalam memberi penilaian untuk melakukan pemberian bantuan ternak, Dinas Peternakan Kabupaten Agam masih menggunakan penilaian mainstream yaitu dengan melakukan penjumlahan keseluruhan kriteria yang sudah terkumpul. Dan kelompok siapa yang paling lengkap mengumpulkan persyaratan tersebut, maka berpeluang besar mendapatkan bantuan ternak, sehingga dalam penerapan bantuan ternak ini masih dirasa kurang relevan. Hal ini dikarenakan pihak Instansi tidak melihat tingkat kepentingan dari setiap kriteria yang ada atau dengan kata lain menyamakan semua nilai setiap kriteria yang ada.

Sistem pendukung keputusan merupakan sebuah pengambilan keputusan dengan menggunakan sebuah sistem berbasis computer. Sistem pendukung keputusan dapat juga digunakan untuk mendukung sebuah instansi dalam melakukan pekerjaan yang bersifat analitis pada situasi kurang baik dan dengan kriteria yang kurang jelas.

Penerapan Sistem Pendukung Keputusan pada penelitian ini menggunakan Metode Weighted Aggregated Sum Product Assesment(WASPAS) merupakan metode kombinasi dari metode WP dan metode SAW, metode WASPAS ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam membantu penentuan sistem pendukung keputusan. Maka akan dibuat solusi terbaik untuk membantu mengambil keputusan menentukan kelayakan bantuan ternak menggunakan metode Weighted Aggregated Sum Product Assesment (WASPAS). Alasan menggunakan metode ini adalah karena metode ini didefinisikan sebagai multikriteria pengambilan keputusan(MCDM) yang dapat dilihat pada pemilihan dari serangkaian alternatif berdasarkan kriteria.

Dari uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul **“SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN MENENTUKAN KELAYAKAN BANTUAN TERNAK OLEH DINAS PETERNAKAN MENGGUNAKAN METODE WASPAS”**

### **1.1 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana merancang dan membuat aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Kelayakan Bantuan Ternak Oleh Dinas Kabupaten Agam?
2. Bagaimana membangun Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Kelayakan Bantuan Ternak Oleh Dinas Kabupaten Agam sesuai spesifikasi kebutuhan instansi yang telah diidentifikasi sebelumnya?

3. Bagaimana merancang suatu Sistem Pendukung Keputusan untuk menentukan kriteria-kriteria yang layak mendapat bantuan ternak dengan metode Weighted Aggregated Sum Product Assesment (WASPAS)?

## **1.2 Hipotesa**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa hipotesa sebagai jawaban dari permasalahan yang ada yaitu:

1. Diharapkan dengan adanya sistem pendukung keputusan menggunakan metode Waspas dapat membantu Dinas Peternakan Kabupaten Agam.
2. Diharapkan dapat membangun Kelayakan Bantuan Ternak Oleh Dinas Kabupaten Agam sesuai spesifikasi kebutuhan instansi.
3. Diharapkan dapat merancang suatu Sistem Pendukung Keputusan sesuai dengan kriteria-kriteria yang layak mendapatkan bantuan ternak.

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam laporan penelitian ini, maka diterapkan batasan-batasan terhadap system yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar langkah-langkah pemecahan masalah tidak menyimpang. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah System yang dibangun adalah system yang dapat mengidentifikasi Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Kelayakan Bantuan Ternak Oleh Dinas Kabupaten Agam.

Data yang dipakai adalah data yang telah didapat melalui wawancara langsung dengan Dinas Kabupaten Agam. Sistem ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 2010 dan Database MySQL.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan diantaranya:

1. Merancang dan membangun sebuah system informasi Pendukung Keputusan Menentukan Kelayakan Bantuan Ternak Oleh Dinas Kabupaten Agam.
2. Memudahkan Dinas Peternakan Kabupaten Agam dalam menentukan kelayakan bantuan ternak.
3. Membantu Dinas Peternakan Kabupaten Agam Dalam menentukan kriteria-kriteria yang berhak Mendapatkan bantuan ternak.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang penulis harapkan pada penelitian ini diantaranya:

1. Memberikan kemudahan bagi Dinas Peternakan Kabupaten Agam dalam Menentukan Kelayakan Bantuan Ternak Oleh Dinas Kabupaten Agam.
2. Membina hubungan baik dengan pihak-pihak terkait
3. Menjadi sarana dalam memberikan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan instansi terkait.
4. Ikut berpartisipasi dalam mempersiapkan calon tenaga kerja yang terampil dan berkualitas, khususnya di bidang sistem informasi.

#### **1.6 Gambaran Umum**

Gambaran umum memberikan penjelasan tentang sejarah berdirinya Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Agam dan struktur organisasi.

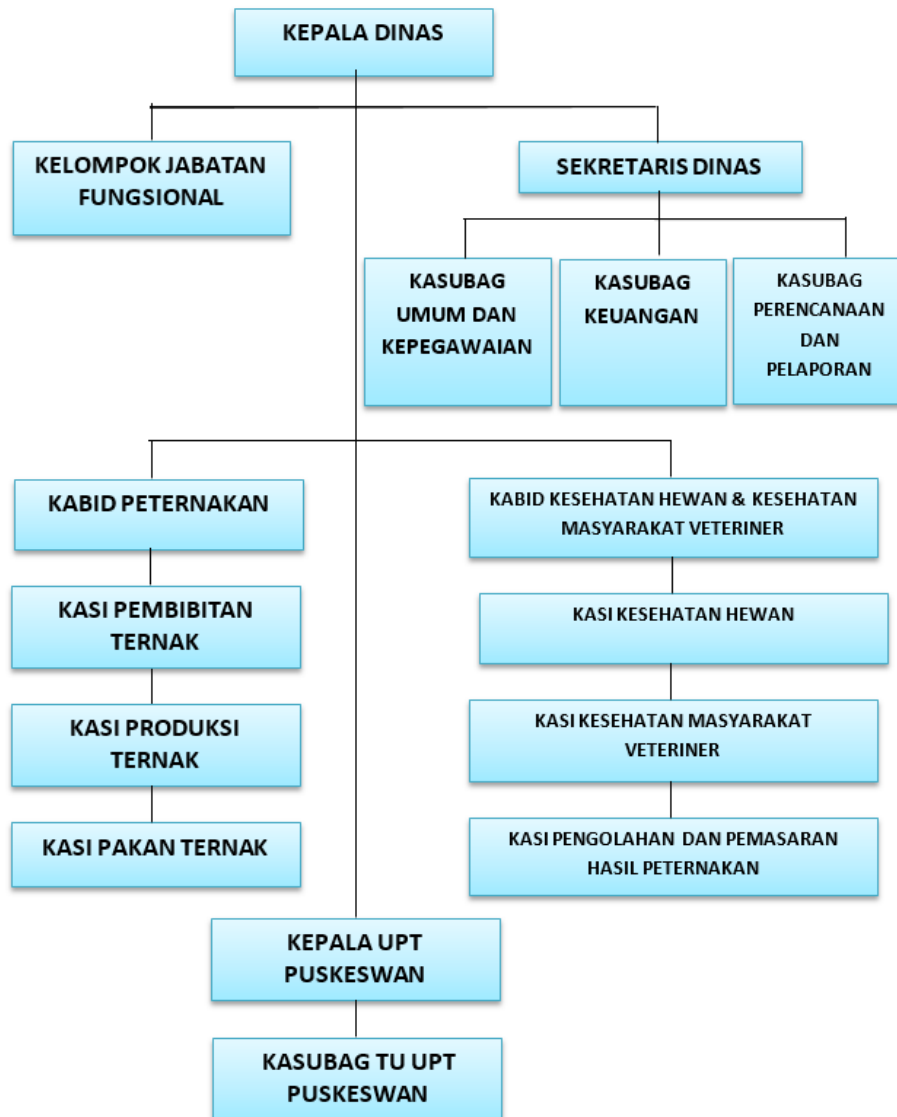
### **1.7.1 Sejarah Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Agam**

Kantor dinas peternakan kabupaten agam merupakan pemekaran dari Dinas Pertanian Kabupaten Agam. Dinas Peternakan Kabupaten Agam mempunyai tugas dan fungsinya. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal Ayat (1) Peraturan Daerah Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Untuk itu Dinas Pertanian Kabupaten Agam ditetapkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dengan tipe A yang mana didalamnya terdapat bagian Peternakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Agam Nomor 44 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja serta Peraturan Bupati Agam Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan.

### **1.7.2 Struktur Organisasi Dinas Peternakan**

Struktur dinas antara peternakan di gabung yang terdapat di dinas peternakan kabupaten agam.



**Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Agam**

Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja sebagaimana yang tertera pada struktur organisasi bagian Peternakan diatas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
  - a. Bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan bawahan.
  - b. Bertanggung jawab mengambil keputusan dari masalah yang di hadapi di kantor dinas.

2. Sekretaris Dinas
  - a. Melaksanakan urusan umum dan ketatalaksanaan bidang kepegawaian, keuangan serta perencanaan Dinas Peternakan.
3. Kasubag Umum Dan Kepegawaian
  - a. Membuat rencana operasionalisasi program kerja kasubag umum dan kepegawaian.
  - b. Menegendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlegkapan dinas, pelaksanaan dan pemakaian kendaraan kantor dinas serta penggunaan kantor.
4. Kasubag Keuangan
  - a. Membuat rencana operasional program kerja bagian keuangan.
  - b. Membuat daftar usulan kegiatan.
  - c. Membuat daftar gaji lingkup dinas peternakan.
5. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
  - a. Menyusun rencana perjalan Dinas Peternakan.
  - b. Menyusun rencana operasional kegiatan kerja bagian perencanaan dan pelaporan.
  - c. Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan dinas.
6. Kabid Peternakan (kepala bidang peternakan)
  - a. Melakukan pengawasan produksi ternak.
  - b. Melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi bibit ternak.



7. Kasi Pembibitan Ternak
  - a. Menyusun rencana kerja seksi pembibitan, produksi dan pakan ternak.
  - b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembibitan, produksi dan pakan ternak.
8. Kasi Produksi Ternak
  - a. Melaksanakan kegiatan peningkatan produksi peternakan.
  - b. Merencanakan operasionalisasi rencana kerja seksi produksi peternakan.
9. Kasi Pakan Ternak
  - a. Menyusun rencana kerja sesi pakan ternak.
  - b. Menyiapkan penyusunan kebijakan pakan ternak.
  - c. Menyiapkan bahan pengelolaan sumber daya genetic hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian.
10. Kabid Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - a. Menyiapkan rancangan rencana anggaran satuan kerja seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
  - b. Mengkoordinasikan rancangan rencana strategi dan rancangan dengan kepala bidang peternakandan kepala seksi produksi peternakan.
11. Kasi kesehatan Hewan
  - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi.

- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan.
- c. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor.

12. Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi.
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan.

13. Kasi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan

- a. Menyusun rencana kerja seksi pengolahan dan pemasaran hasil ternak.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan.

**1.7.3 Visi, Misi Dinas Peternakan Kabupaten Agam**

Visi dari Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Agam yaitu “Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Peternakan”.

Misi dari Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Agam adalah:

- 1. Mengembangkan kawasan utama ternak unggul yang telah ditetapkan.
- 2. Meningkatkan pendapatan masyarakat peternakan sarana dan prasarana pengembangan peternakan.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat peternakan.